

Kolaborasi Negara–Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Komparatif Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Sulis¹

¹University of Banten; Email: sulis@unair.ac.id

*Corresponding Author: sulis@unair.ac.id

Citation: Aziz (2026). The Title of Article (Book Antiqua 14pt Bold). *Issues, Methods, and Advances in Engineering Research*, 10(4), xx–xx. <https://doi.org/0000-0000>

Published: 28/04/2026

ABSTRACT

This article analyzes how state–society collaboration shapes poverty reduction governance in urban and rural Indonesia. Using a comparative secondary-data-based case study, it compares the governance mechanisms of urban poverty and rural poverty interventions. Indonesia’s poverty rate declined to 9.03 percent in March 2024, but urban and rural poverty remain governed by different structural conditions. Urban poverty is closely linked to informal employment, housing vulnerability, and service access, while rural poverty is shaped by agricultural productivity, infrastructure, and local institutional capacity. The article argues that poverty governance effectiveness depends on the interaction between targeting accuracy, institutional coordination, community participation, and adaptive local implementation. The novelty of this study lies in its comparative governance model that explains poverty reduction as a collaborative mechanism rather than a purely redistributive policy. The article contributes to politics and governance studies by showing that poverty reduction requires not only social assistance, but also local governance capacity, social accountability, and cross-sectoral coordination.

Keywords: poverty governance; state-society collaboration; urban poverty; rural poverty; Indonesia

INTRODUCTION

Kemiskinan tetap menjadi isu sentral dalam politics and governance studies karena ia tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan, tetapi juga ketimpangan akses terhadap kekuasaan, layanan, dan perlindungan sosial. Secara global, pendekatan penanggulangan kemiskinan telah bergeser dari program bantuan tunggal menuju tata kelola perlindungan sosial yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Di Indonesia, BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. BPS juga mencatat garis kemiskinan rumah tangga miskin rata-rata sebesar Rp2.786.415 per rumah tangga miskin per bulan pada periode tersebut (BPS, 2024).

Penurunan agregat ini penting, tetapi tidak menghapus perbedaan struktur kemiskinan kota dan desa. Laporan World Bank Poverty and Equity Brief menyatakan bahwa tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada 2024 menurun secara bertahap, dengan penurunan perdesaan lebih kuat daripada perkotaan; kemiskinan perkotaan turun dari 7,3 persen pada Maret 2023 menjadi 7,1 persen pada Maret 2024, sedangkan kemiskinan perdesaan menurun lebih nyata (World Bank, 2024). Artinya, tantangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan berbeda secara kelembagaan.

Literatur collaborative governance menekankan bahwa penyelesaian masalah kompleks membutuhkan keterlibatan negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Dalam studi kebijakan sosial, efektivitas program perlindungan sosial bergantung pada akurasi data, koordinasi lintas lembaga, dan kemampuan menjangkau kelompok rentan (World Bank, 2022). Namun,

literatur tersebut sering memisahkan analisis kemiskinan kota dan desa. Akibatnya, perbedaan mekanisme tata kelola kurang terlihat.

Research gap artikel ini terletak pada kurangnya model komparatif yang menjelaskan bagaimana tata kelola kemiskinan bekerja secara berbeda di wilayah perkotaan dan perdesaan. Gap teoritisnya adalah kebutuhan menghubungkan collaborative governance dengan poverty governance. Gap empirisnya adalah kebutuhan membaca data kemiskinan tidak hanya sebagai statistik kesejahteraan, tetapi sebagai indikator kapasitas tata kelola.

Novelty artikel ini adalah model Targeting Accuracy → Institutional Coordination → Community Participation → Poverty Reduction Outcome. Artikel ini berargumen bahwa program kemiskinan efektif ketika data sasaran akurat, institusi pelaksana terkoordinasi, dan masyarakat terlibat dalam pemantauan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan perbedaan mekanisme tata kelola kemiskinan kota dan desa serta implikasinya bagi desain kebijakan sosial.

METHODOLOGY

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif berbasis data sekunder. Kasus yang dibandingkan adalah tata kelola kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Pemilihan kasus didasarkan pada perbedaan struktur sosial-ekonomi, bentuk kerentanan, dan mekanisme layanan publik. Unit analisis adalah mekanisme kolaborasi negara-masyarakat dalam proses pendataan, penyaluran bantuan, pemberdayaan, dan pemantauan outcome.

Data yang digunakan meliputi rilis BPS tentang kemiskinan Maret 2024, laporan World Bank, dokumen kebijakan perlindungan sosial, dan literatur akademik tentang collaborative governance serta poverty governance. Tidak tersedia wawancara primer, sehingga artikel ini tidak menggunakan kutipan informan. Analisis dilakukan melalui perbandingan tematik terhadap empat variabel: akurasi sasaran, koordinasi lembaga, partisipasi komunitas, dan outcome penurunan kemiskinan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber resmi dan literatur akademik.

RESULTS & DISCUSSION

1. Struktur kemiskinan kota dan desa

Kemiskinan perkotaan cenderung terkait dengan pekerjaan informal, biaya hidup tinggi, ketidakamanan hunian, dan akses layanan dasar. Meskipun persentase kemiskinan perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, kerentanan perkotaan dapat lebih volatil karena bergantung pada pasar kerja informal dan harga kebutuhan pokok. Sebaliknya, kemiskinan perdesaan terkait dengan produktivitas pertanian, keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas pemerintah desa.

Data BPS tentang penurunan kemiskinan nasional menjadi 9,03 persen pada Maret 2024 menunjukkan perbaikan agregat, tetapi tidak menjelaskan mekanisme lokal yang menghasilkan penurunan tersebut (BPS, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan harus dibaca bersama kapasitas tata kelola wilayah. Penurunan kemiskinan bukan hanya outcome ekonomi, melainkan juga outcome koordinasi kebijakan.

2. Koordinasi institusional dan akurasi sasaran

Program pengurangan kemiskinan membutuhkan data sasaran yang akurat. Di wilayah perkotaan, mobilitas penduduk dan pekerjaan informal membuat pendataan lebih sulit. Di wilayah perdesaan, masalah utama adalah pembaruan data, akses administratif, dan keterbatasan verifikasi. Dengan demikian, kesalahan inclusion dan exclusion dapat muncul dalam bentuk berbeda.

Kondisi ini mendukung argumen collaborative governance bahwa masalah kompleks membutuhkan koordinasi lintas aktor. Pemerintah pusat menyediakan kerangka program dan pembiayaan, pemerintah daerah mengelola implementasi, sementara komunitas lokal berperan dalam validasi sosial. Tanpa kolaborasi ini, data

kemiskinan dapat menjadi instrumen administratif yang tidak menangkap realitas kerentanan.

3. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial

Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan program tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga legitimate. Di desa, musyawarah dan kelembagaan lokal dapat menjadi arena validasi penerima manfaat. Di kota, organisasi komunitas, RT/RW, dan kelompok masyarakat sipil dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan seperti pekerja informal, penyewa, dan keluarga tanpa jaminan sosial kuat.

Namun, partisipasi tidak otomatis inklusif. Elite lokal dapat memengaruhi daftar penerima, sementara kelompok paling rentan sering tidak memiliki suara. Dengan demikian, akuntabilitas sosial harus dirancang dengan mekanisme pengaduan, transparansi daftar penerima, dan evaluasi terbuka.

Tabel 1. Tabel bukti analitis tata kelola kemiskinan

Variabel	Temuan Empiris	Bukti Data/Kutipan	Interpretasi Analitis
Tingkat kemiskinan	Kemiskinan nasional turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2024	Rilis BPS Maret 2024 (BPS, 2024)	Penurunan agregat perlu dibaca melalui variasi tata kelola lokal
Struktur wilayah	Kemiskinan kota dan desa memiliki penyebab berbeda	World Bank mencatat perbedaan tren urban dan rural poverty pada 2024 (World Bank, 2024)	Kebijakan seragam berisiko tidak adaptif
Kolaborasi	Akurasi sasaran membutuhkan validasi negara dan masyarakat	Literatur collaborative governance (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012)	Partisipasi warga menjadi instrumen koreksi data

Sumber: diolah dari BPS (2024), World Bank (2024), Ansell dan Gash (2008), serta Emerson et al. (2012).

4. Model konseptual

Model yang ditawarkan adalah:

Akurasi Sasaran → Koordinasi Institusional → Partisipasi Komunitas → Akuntabilitas Sosial → Penurunan Kemiskinan

Model ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besaran bantuan, tetapi juga kualitas tata kelola kolaboratif.

CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dipahami sebagai persoalan governance, bukan hanya redistribusi. Perbandingan kemiskinan kota dan desa memperlihatkan bahwa struktur kerentanan berbeda membutuhkan desain implementasi berbeda. Kemiskinan perkotaan menuntut respons terhadap pekerjaan informal, biaya hidup, dan akses layanan, sedangkan kemiskinan perdesaan memerlukan penguatan produktivitas, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan lokal.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah menghubungkan collaborative governance dengan poverty governance melalui model akurasi sasaran, koordinasi, partisipasi, dan akuntabilitas sosial. Secara praktis, program pengurangan kemiskinan harus memperkuat data dinamis, validasi komunitas, dan mekanisme pengaduan. Secara kebijakan, pemerintah perlu membedakan strategi kota dan desa agar intervensi lebih adaptif. Secara politik, partisipasi warga harus dijaga agar tidak berubah menjadi legitimasi formal bagi keputusan elite lokal.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.*
- BPS. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024.*
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.*
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.*
- World Bank. (2022). Adaptive social protection in Indonesia.*
- World Bank. (2024). Indonesia poverty and equity brief.*
- Torfing, J., et al. (2021). Public governance paradigms. Edward Elgar.*